

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil Indeks pekerjaan layak bahwa pekerja non upah yang mempunyai pekerjaan layak adalah lebih besar dibandingkan mereka yang tidak mempunyai pekerjaan layak.
2. Pelatihan umum, pelatihan khusus, pendidikan dan teknologi, usia, gender dan lokasi berpeluang besar dalam mempengaruhi pekerjaan layak di Indonesia. Namun kesehatan berkorelasi negatif dan signifikan terhadap pekerjaan layak. Hal ini berarti bahwa orang yang sehat tapi tidak produktif berpeluang kecil terhadap pekerjaan layak. Ada dilema antara kesehatan dengan pekerjaan layak karena kesehatan yang buruk karena produktif dan bekerja keras yang pada akhirnya menghasilkan pekerjaan layak. Lokasi berkorelasi positif dan signifikan terhadap pekerjaan layak. Hal ini berarti bahwa semakin banyak pekerja non upah berada dilokasi perkotaan maka semakin besar peluang mendapatkan pekerjaan layak. Kota mempunyai fasilitas infrastruktur yang lengkap dibandingkan daerah pedesaan seperti listrik, jalan, jaringan telekomunikasi, perbankan dan lain-lain.
3. Pelatihan umum dan khusus mulai pada level pendidikan yang tidak menamatkan sekolah dasar sampai level pendidikan yang menamatkan sekolah menengah tingkat atas bisa memperbaiki pekerja non upah dalam memperoleh pekerjaan layak. Namun pelatihan umum dan khusus pada perguruan tinggi tidak memperbaiki pekerja non upah dalam memperoleh pekerjaan layak.
4. Semakin banyak pelatihan diikuti dengan semakin tingginya level pendidikan, semakin kecil dampaknya dalam memiliki pekerjaan layak. Artinya semakin tinggi pendidikan pekerja akan sedikit yang mengikuti jumlah pelatihan karena tidak diperlukan lagi. Namun sebaliknya yang

terjadi. Semakin rendah level pendidikan semakin banyak jumlah pelatihan yang diikuti.

5. Pelatihan umum yang bagi pekerja non upah laki-laki mempunyai peluang yang lebih kecil terhadap pekerjaan layak dibandingkan pelatihan umum yang diberikan kepada perempuan. Perempuan adalah multi talenta dan sangat kompeten dalam pengembangan diri, berkomunikasi dan melakukan penjualan. Perempuan sudah banyak memberikan peran dalam pekerjaan karena ada kesetaraan gender dengan rata-rata pendidikan sudah lebih tinggi dibandingkan laki-laki secara rata-rata.
6. Pelatihan khusus yang diperlukan oleh pekerja non upah laki-laki mempunyai peluang yang lebih kecil terhadap pekerjaan layak dibandingkan pelatihan khusus yang diberikan kepada perempuan. Banyak program pelatihan diberikan kepada perempuan agar kesempatan kerja perempuan semakin besar sehingga status ekonomi perempuan terangkat dan kesetaraan gender tercapai. Perempuan juga sangat berkompeten dalam menghasilkan kreativitas dalam kegiatan usahanya.
7. Pelatihan umum ini berbasiskan wilayah pedesaan besar peluangnya dalam mendapatkan pekerjaan layak. Program pemberdayaan ini berupa pelatihan umum bagaimana menguatkan usaha masyarakat desa agar bisa mandiri sehingga kualitas kehidupan mereka meningkat dan sejahtera.
8. Pelatihan khusus berbasiskan wilayah pedesaan besar peluangnya dalam mendapatkan pekerjaan layak. Pelatihan ini dilakukan dalam upaya pengembangan usaha di Indonesia. Pelatihan-pelatihan khusus lainnya yang berbasiskan kearifikan lokal lainnya. Setiap wilayah mempunyai usaha-usaha kreatif yang berbeda-beda yang memerlukan pelatihan khusus yang berbeda.
9. Penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan pemerintah terutama pada Departemen Tenaga kerja agar meningkatkan pelatihan yang sesuai kebutuhan wirausahawan berupa pelatihan teknologi digital terutama yang berada dipedesaan karena akses terhadap teknologi dan kemampuan dalam menggunakannya masih menjadi sebuah tantangan besar. Pentingnya pelatihan digital agar mereka mampu bersaing di era yang serba digital

seperti penggunaan komputer, aplikasi dan platfor digital yang mendukung usaha pekerja non upah dalam kegiatan ekonomi seperti penggunaan media sosial untuk promosi produk lokal, pengelolaan keuangan digital, dan penggunaan teknologi dalam sektor pertanian. Pelatihan digital ini dapat membantu mereka memperoleh pekerjaan yang layak. Efektivitas pelatihan sangat bergantung pada konteks lokal, kualitas program, dan keselarasan dengan kebutuhan pasar kerja.

## **B. Saran**

Saran yang yang diberikan kepada penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis faktor social ekonomi lainnya selain yang ada dalam penelitian ini
2. Menganalisis indeks pekerjaan layak pada beberapa sektor ekonomi yang merupakan salah satu keterbatasan dalam penelitian ini.
3. Menggunakan metode yang berbeda dalam mencari indeks pekerjaan layak secara mikro dan makro dengan sampel yang berbeda.

## **C. Implikasi Kebijakan**

Implikasi Kebijakan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan tenaga kerja Indonesia rata-rata masih 9 tahun sekolah maka pemerintah lebih menintensifkan lagi membuat program-program pelatihan apakah itu wujudnya dalam pemberdayaan kepada masyarakat atau keterlibatan perguruan tinggi lebih besar dalam memberikan pelatihan kepada masyarakat. Pelatihan khusus dan umum meningkatkan produktivitas pekerja terutama mereka yang masih berpendidikan dibawah sekolah menengah atas kebawah. Temuan ini bisa menjadi dasar untuk mengalokasikan sumber daya pelatihan secara lebih efisien. Misalnya, lebih banyak program bisa diarahkan untuk mendukung pelatihan bagi pekerja dengan pendidikan lebih rendah, sementara strategi yang berbeda bisa digunakan untuk pekerja yang berpendidikan lebih tinggi.

2. Penguatan Program Pelatihan Khusus dan Umum untuk Pekerja Non-Upah dengan Pendidikan Rendah. Pemerintah dapat memberi pekerja non-upah, terutama mereka yang tidak menamatkan sekolah dasar atau hanya menamatkan sekolah menengah, lebih banyak akses ke pelatihan keterampilan dasar hingga menengah atas. Hal ini penting untuk meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.
3. Program pelatihan yang disesuaikan: kebijakan harus mendorong pengembangan program pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pengusaha pedesaan karena kebutuhan unik mereka. Pengembangan keterampilan digital: mengingat pentingnya teknologi digital, kebijakan harus memprioritaskan pengembangan keterampilan digital untuk pengusaha pedesaan. Hal ini dapat membantu mereka memanfaatkan platform online untuk mempromosikan bisnis mereka, menjual barang, dan mendapatkan informasi atau sumber daya. Pengembangan Infrastruktur: Infrastruktur pedesaan, seperti akses internet yang stabil dan fasilitas pelatihan, harus menjadi fokus kebijakan. Hal ini memungkinkan para pengusaha mengakses sumberdaya pelatihan online dan berpartisipasi dalam kursus virtual.
4. Mengoptimalkan teknologi untuk meningkatkan peluang pekerjaan yang layak agar pekerja non-upah tetap berdaya saing di pasar kerja yang semakin canggih, kebijakan harus berkonsentrasi pada penyediaan teknologi, pelatihan digital, dan akses internet.
5. Dengan mempertimbangkan Teori Mincer, sangat penting bagi pembuat kebijakan untuk membuat program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha terutama dalam investasi dalam pendidikan dan pelatihan.
6. Kebijakan harus mendorong kolaborasi di antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, lembaga pelatihan, LSM, dan masyarakat lokal. Kolaborasi ini dapat menghasilkan inisiatif pelatihan yang lebih komprehensif dan efektif. Pemantauan dan evaluasi: Kebijakan harus menekankan pentingnya pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas program pelatihan di daerah pedesaan. Hal ini membantu

mengidentifikasi bidang-bidang yang perlu ditingkatkan dan memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara efisien.

7. Berdasarkan status pekerjaan utama bahwa jumlah pekerja non upah lebih banyak berada pada daerah pedesaan adalah 60,6 persen dibandingkan di daerah perkotaan sebesar 40,76 persen. Ini menunjukkan bahwa pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung untuk pelatihan umum dan pelatihan di daerah pedesaan, memberdayakan wirausahawan agar mendapatkan pekerjaan layak dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi pedesaan.
8. Program Dukungan Kesehatan untuk Meningkatkan Produktivitas Pekerja Non-Upah: Ada korelasi negatif antara kesehatan dan pekerjaan layak, jadi pemerintah harus meningkatkan program kesehatan khusus untuk pekerja non-upah agar mereka lebih produktif dan memiliki lebih banyak peluang untuk mendapatkan pekerjaan layak juga.
9. Kaum perempuan sejauh ini perempuan sudah bisa membuktikan keikutsertaannya di dalam proses pembangunan. Dimasa depan, pemerintah dan seluruh stakeholder terkait hanya perlu memberikan kesempatan yang lebih luas kepada perempuan agar kontribusi yang diberikan dapat lebih optimal.
10. Temuan ini juga menunjukkan pentingnya pelatihan sebagai alat untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Pelatihan yang tepat bagi mereka yang berpendidikan lebih rendah bisa membantu mereka mendapatkan pekerjaan yang lebih layak dan secara keseluruhan meningkatkan inklusi sosial.

#### **D. Kontribusi Penelitian**

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi pada kebijakan pembangunan SDGs kedelapan yaitu mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pekerjaan layak untuk semua. Berdasarkan hasil ditemukan bahwa laki-laki mempunyai peluang kecil mendapatkan pekerjaan layak. Pemerintah perlu memperbaiki pekerja non upah laki-laki agar mendapatkan pekerjaan layak melalui membuka program pelatihan dan pengembangan keterampilan yang lebih banyak

yang dilakukan oleh instansi pemerintah seperti Dinas tenaga kerja dan lain-lainnya. Ini bisa termasuk kursus-kursus pelatihan umum dan khusus seperti pelatihan profesional, pengembangan keterampilan teknis, atau pelatihan kewirausahaan.

Kajian tentang model interaksi gender mempunyai kontribusi bahwa perempuan mempunyai peluang yang besar mendapatkan pekerjaan layak sebagai pekerja non upah. Apalagi jika perempuan mendapatkan pelatihan umum dan khusus, mempunyai peluang besar mereka mendapatkan pekerjaan layak sehingga mendorong para perempuan yang semula berada pada bukan angkatan kerja masuk kedalam angkatan kerja yang bekerja.

Berdasarkan hasil model interaksi pelatihan umum yang berbasiskan wilayah bahwa masyarakat pedesaan membutuhkan pelatihan umum dan khusus agar mendapatkan pekerjaan layak. Hal ini disebabkan masih terbatas akses terhadap pendidikan dan pelatihan di pedesaan, diperlukan upaya yang lebih besar lagi terutama stakeholder di pedesaan agar tenaga kerja non upah pedesaan mendapatkan pelatihan dengan mudah.

